

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keuangan. Era digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara orang dan lembaga mengakses, mengelola, serta mendistribusikan sumber daya finansial. Digitalisasi keuangan menciptakan ekosistem baru yang memungkinkan transaksi lebih cepat, efisien, dan tidak terpengaruh oleh ruang atau waktu. World Bank (2022) mengungkapkan bahwa digitalisasi keuangan secara signifikan meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi biaya operasional, serta menjadi faktor utama dalam pertumbuhan inklusi keuangan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Peningkatan ini membuka peluang bagi jutaan orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal untuk mendapatkan berbagai instrumen dan layanan keuangan modern.

Perluasan akses layanan keuangan digital tidak secara otomatis meningkatkan *financial well-being* masyarakat. Jika perluasan akses tidak diimbangi dengan literasi dan kemampuan mengelola keuangan yang baik, hal itu malah berpotensi memperburuk kondisi finansial individu dalam jangka panjang. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform keuangan digital sering kali memperburuk perilaku keuangan yang tidak terencana, mendorong pengeluaran melebihi kemampuan, dan menciptakan beban utang yang sulit diatur. Fenomena

ini semakin diperparah dengan hadirnya layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah *paylater*, yang dalam lima tahun terakhir telah mengubah cara konsumsi masyarakat secara signifikan. Layanan ini memberikan kemudahan bertransaksi secara kredit tanpa membutuhkan dokumen yang rumit, tanpa agunan, dan proses persetujuan yang hampir instan, sehingga sangat mudah diakses bahkan oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke fasilitas kredit perbankan tradisional.

Dalam konteks tersebut, pemahaman mengenai *financial well-being* menjadi semakin penting. Hernandez-Perez dan Cruz Rambaud (2025) mendefinisikan *financial well-being* sebagai kondisi kesejahteraan keuangan yang ditandai oleh kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dan kewajiban finansial saat ini maupun masa depan, mempertahankan rasa aman terhadap kondisi keuangannya, serta memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan keuangan yang mendukung kualitas hidup dan pencapaian tujuan jangka panjang. Rahmadhani dan Nasution (2025) memperluas definisi ini dengan menekankan dimensi psikologis dari *financial well-being*, yakni perasaan aman, kepuasan hidup secara keseluruhan, dan rendahnya tekanan finansial, sehingga seseorang dapat dianggap memiliki *financial well-being* yang baik bukan hanya karena pendapatannya tinggi, tetapi juga karena mampu mengelola sumber daya yang ada dengan bijak. Kondisi *financial well-being* menjadi semakin penting untuk diperhatikan pada era digital saat ini, mengingat kemudahan akses terhadap berbagai layanan keuangan tidak selalu diikuti dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijaksana.

Data yang ada menunjukkan bahwa kondisi *financial well-being* masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan, khususnya di kalangan pengguna layanan keuangan digital. Menurut OJK (2024) dan *Google, Temasek, & Bain and Company* (2024) sekitar 35% penduduk Indonesia hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya tanpa memiliki tabungan yang memadai, dan hanya sekitar 40% yang merasa aman dalam segi keuangan.

Tabel 1. 1 Kondisi *Financial Well-Being* Masyarakat Indonesia

Indikator	Persentase
Mengalami stres karena tagihan dan cicilan	±25%
Hidup dari gaji ke gaji	±35%
Merasa aman secara finansial	±40%
Pengguna <i>paylater</i> mengalami <i>financial hardship</i>	±18%
Indeks literasi keuangan nasional	65,43%
Inklusi keuangan	72,02%

Sumber: CFPB Framework; OJK (2024); McKinsey (2023); *Google, Temasek, & Bain and Company* (2024)

Tabel 1.1 mengindikasikan bahwa akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan keuangan individu. Sebagian besar masyarakat produktif Indonesia masih menghadapi ketidakstabilan keuangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekitar 25% dari populasi merasakan stres emosional yang signifikan akibat tekanan dari tagihan dan pembayaran cicilan yang terus meningkat setiap bulannya. Beban keuangan ini tidak hanya berpengaruh pada kondisi finansial, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, produktivitas di tempat kerja, serta kualitas interaksi sosial individu yang bersangkutan. Ketidakesesuaian antara peningkatan akses keuangan dan kondisi kesejahteraan finansial masyarakat menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang turut

menentukan *financial well-being* seseorang, dan fenomena ini semakin diperparah oleh pertumbuhan pesat layanan *paylater* yang dapat menyebabkan stres finansial pengguna jika tidak direncanakan secara matang.

Keterkaitan antara rendahnya *financial well-being* dan meningkatnya penggunaan *paylater* sangat terlihat dari data pertumbuhan pengguna yang melonjak drastis, bersamaan dengan peningkatan kasus kesulitan finansial di masyarakat. Berdasarkan data OJK (2024) jumlah pengguna BNPL meningkat dari kurang lebih 5 juta orang pada tahun 2020 menjadi 30,31 juta orang pada tahun 2025, sedangkan total nilai kredit yang beredar meroket dari Rp7,3 triliun menjadi Rp30,36 triliun pada puncaknya di tahun 2024. Walaupun rasio kredit bermasalah yang diukur dengan indikator TWP90 berada di angka yang relatif rendah di bawah 3%, jumlah total individu yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran justru meningkat dari 125.000 orang pada tahun 2020 menjadi 851.440 orang pada tahun 2024, atau naik hampir tujuh kali lipat dalam periode hanya empat tahun.

Tabel 1. 2 Pertumbuhan Pengguna dan Nilai Kredit Paylater 2020–2025

Tahun	Jumlah Pengguna	Nilai Kredit (Triliun Rp)	Gagal Bayar (pengguna)	Rasio Bermasalah (%)
2020	±5 juta	±Rp7,3 triliun	125.000	2,5%
2021	±8 juta	±Rp12 triliun	208.000	2,6%
2022	±12 juta	±Rp18 triliun	324.000	2,7%
2023	±18 juta	±Rp25 triliun	504.000	2,8%
2024	29,36 juta	Rp30,36 triliun	851.440	2,9%
2025	30,31 juta	Rp24,86 triliun	791.091	2,61%

Sumber: OJK (2024); Statista (2025); Liputan6 (2025); Infobanknews.com (2025)

Data pada Tabel 1.2 mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan BNPL tidak hanya mencerminkan pertumbuhan transaksi, tetapi juga peningkatan

potensi kerentanan finansial pengguna. Lonjakan nilai kredit BNPL yang lebih dari empat kali lipat dari tahun 2020 hingga 2024 menandakan bahwa bagian pengeluaran masyarakat yang berasal dari utang jangka pendek terus meningkat dari tahun ke tahun. Penurunan pertumbuhan yang terlihat pada data tahun 2025 bukan semata-mata mencerminkan perbaikan kondisi, tetapi juga merupakan respons terhadap berbagai kebijakan kehati-hatian yang mulai diberlakukan oleh pihak regulator. McKinsey (2023) menyatakan bahwa *Buy Now Pay Later* merupakan metode pembayaran dengan tingkat pertumbuhan tertinggi secara global, namun juga memperingatkan bahwa kemudahan akses yang menjadi daya tarik utama dapat menjadi risiko yang sering diabaikan oleh banyak pengguna. OJK (2024) mengingatkan bahwa kelancaran dalam membayar tidak selalu menunjukkan keadaan keuangan yang sehat secara menyeluruh, sebab banyak pengguna terpaksa mengorbankan tabungan jangka panjang, menunda pemenuhan kebutuhan dasar, atau bahkan mencari utang baru dari sumber lain untuk membayar cicilan *paylater* yang jatuh tempo, suatu situasi yang dalam literatur keuangan dikenal dengan istilah *financial fragility*.

Gambaran nasional yang mengkhawatirkan tersebut turut tercermin pada kondisi di tingkat regional, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Perkembangan layanan keuangan digital di wilayah ini berlangsung semakin pesat, didorong oleh tingginya penetrasi internet di Jawa Timur yang mencapai 81,26 persen pada tahun 2023 (APJII, 2023), meningkatnya volume transaksi *e-commerce* secara nasional yang tumbuh dari Rp266,3 triliun pada 2020 menjadi Rp487,01 triliun pada 2024 (Bank Indonesia, 2024), serta pesatnya pertumbuhan pembiayaan *fintech P2P*

lending di Jawa Timur yang meningkat sebesar 28,85 persen year-on-year hingga mencapai Rp9,36 triliun pada Oktober 2024 (OJK, 2024). Namun, peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan masyarakat dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan. Kondisi ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada karakteristik spesifik Karesidenan Madiun, yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Wilayah ini memiliki ciri khas ekonomi lokal yang berbeda dibandingkan kota-kota besar, sehingga hasil penelitian yang dilakukan di Jakarta, Surabaya, atau Bandung tidak dapat langsung diterapkan tanpa mempertimbangkan perbedaan mendasar dalam struktur ekonomi, tingkat pendapatan, pola konsumsi, dan dinamika sosial budaya masyarakat setempat. Tingkat *financial well-being* masyarakat di Karesidenan menunjukkan adanya tekanan finansial yang nyata. Salah satu indikator yang paling mencolok adalah kesenjangan antara rata-rata biaya hidup dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah ini.

Tabel 1. 3 Biaya Hidup dibandingkan Pendapatan Karesidenan Madiun

Tahun	Rata-Rata Biaya Hidup	UMK Karesidenan Madiun	Keterangan
2018	Rp6.212.953	±Rp1,8 juta	Konsumsi tinggi
2022	Rp7.048.502	Rp2.274.277	Kesenjangan besar
2024	±Rp7 juta	±Rp2,3 juta	Konsumtif meningkat

Sumber: Radar Madiun – Jawa Pos (2025)

Tabel 1.3 menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang berpotensi memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mempertahankan stabilitas keuangan. Terdapat perbedaan mencolok antara rata-rata biaya hidup yang sekitar Rp7 juta

per bulan dan UMK yang hanya berkisar Rp2,3 juta per bulan, sehingga menciptakan rasio ketidakseimbangan hampir 3:1 pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat berpotensi memanfaatkan layanan *paylater* sebagai alternatif untuk menjaga kelancaran konsumsi ketika pendapatan yang dimiliki belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan hidupnya.

Asian Development Bank (2023) menyatakan bahwa masyarakat di negara-negara berkembang cenderung memanfaatkan kredit digital sebagai alat untuk menyesuaikan kekurangan likuiditas jangka pendek, bukan sebagai keputusan finansial yang terencana. Pola pemanfaatan *paylater* semacam ini sangat berbeda dengan perilaku pengguna di kota-kota besar, yang umumnya memanfaatkan *paylater* sebagai alat pengelolaan arus kas yang lebih fleksibel, sehingga menciptakan perbedaan mendasar dalam tingkat risiko keuangan yang dihadapi. Selain kesenjangan pendapatan dan biaya hidup, karakteristik ekonomi dan profil demografis pengguna *paylater* di Karesidenan Madiun turut memperkuat relevansi wilayah ini sebagai konteks penelitian.

Tabel 1. 4 Struktur Ekonomi dan Pengguna *Paylater* di Karesidenan Madiun

Indikator	Nilai
Pertumbuhan ekonomi Karesidenan Madiun	6,35%
Dominasi sektor tersier	78,56%
Konsumsi rumah tangga terhadap PDRB	72,10%
Pengguna <i>paylater</i> usia 20–30 tahun	45,08%
Pengguna <i>paylater</i> usia 30–40 tahun	29,38%

Sumber: BPS Jawa Timur (2024); *desakarangbendo.id* (2026); *Niqosiya* (2023)

Data pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif 20–40 tahun mendominasi penggunaan layanan *paylater* di wilayah ini, sejalan dengan

data OJK (2024) yang mencatat lebih dari 70% pengguna BNPL nasional berada pada rentang usia yang sama. Kelompok ini memiliki karakteristik yang unik karena berada pada fase pembentukan karier, peningkatan pendapatan, pembentukan keluarga, serta akumulasi aset jangka panjang, sementara pada saat yang sama menghadapi tekanan konsumsi yang tinggi akibat kebutuhan gaya hidup, tuntutan sosial, dan kemudahan akses terhadap kredit digital. Selain itu, dominasi sektor jasa sebesar 78,56% serta kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB yang mencapai 72,10% menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi kawasan, sehingga penggunaan layanan kredit digital berpotensi terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi berbasis kredit digital berpotensi terus meningkat seiring dengan tekanan kebutuhan yang dihadapi kelompok usia produktif di wilayah ini.

Karakteristik demografis tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor psikososial yang turut membentuk pola konsumsi masyarakat di Karesidenan Madiun, yang memiliki ciri khas unik dan perlu mendapat perhatian khusus. Penelitian yang dilakukan oleh Niqosiya (2023) menunjukkan bahwa konsep diri berkontribusi sebesar 48,9%, gaya hidup menyumbang 24,2%, dan paparan media sosial menyumbang 22,4%, yang secara kolektif dan bersamaan mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat di wilayah ini, dengan total kontribusi model menjelaskan varians sebesar 48,3% dari variasi dalam perilaku konsumtif yang teramati. Temuan ini jelas menunjukkan bahwa penggunaan *paylater* di Karesidenan Madiun tidak hanya dipicu oleh kebutuhan ekonomi yang objektif,

tetapi juga secara signifikan oleh tekanan sosial dari komunitas dan aspirasi identitas yang dipengaruhi oleh ekosistem media digital. Deloitte (2024) mencatat bahwa media sosial seperti Instagram dan TikTok telah mengubah cara berbelanja menjadi lebih visual, lebih cepat, dan lebih responsif terhadap tren yang cepat berubah, mendorong penggunaan *paylater* tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk mempertahankan status sosial dan citra diri di hadapan komunitas digital. Kombinasi antara tekanan ekonomi struktural dan tekanan sosial-digital yang mendorong konsumsi aspiratif menciptakan lingkungan yang berisiko tinggi bagi *financial well-being* pengguna *paylater*, di mana *financial capability*, *self-control*, dan *financial risk tolerance* menjadi faktor penentu yang krusial namun kerap terabaikan.

Rendahnya *financial well-being* mencerminkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan individu di tengah meningkatnya akses terhadap kredit digital. Hernandez-Perez dan Cruz Rambaud (2025) telah membuktikan secara empiris bahwa kesulitan finansial berdampak negatif dan signifikan terhadap *financial well-being*, di mana individu yang terjat dalam siklus utang konsumtif secara terus-menerus menunjukkan tingkat *financial well-being* yang lebih rendah, disertai dengan tingkat kecemasan dan stres psikologis yang lebih tinggi. Beban finansial yang berkepanjangan terbukti memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk penurunan produktivitas, melemahnya hubungan sosial, dan berkurangnya kemampuan untuk mengambil keputusan rasional dalam hal keuangan. Dinamika negatif antara tekanan finansial dan berkurangnya

kemampuan pengambilan keputusan inilah yang menjadikan kondisi *financial hardship* sulit diatasi tanpa adanya intervensi yang tepat dan efektif.

Menurut OJK (2024) peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital berlangsung sangat cepat, namun *financial well-being* yang sejati belum dapat dicapai secara merata oleh masyarakat Indonesia. Kesenjangan antara indeks inklusi keuangan yang mencapai 72,02% dan indeks literasi keuangan yang hanya sebesar 65,43% menunjukkan bahwa jutaan orang di Indonesia menggunakan produk keuangan, termasuk *paylater*, tanpa pemahaman dan kemampuan yang memadai untuk mengelolanya dengan baik. OECD (2022) menyatakan bahwa dalam negara-negara berkembang, ketimpangan antara inklusi dan literasi keuangan adalah masalah yang umum dan berbahaya, menciptakan situasi di mana masyarakat menjadi rentan terhadap manipulasi produk keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka yang sebenarnya. Dalam konteks *paylater*, perbedaan antara inklusi dan literasi keuangan menjadi semakin krusial karena kemudahan akses tanpa dukungan kemampuan keuangan yang memadai dapat merugikan *financial well-being* pengguna secara langsung.

Permasalahan rendahnya *financial well-being* tersebut mendorong perhatian pada kapasitas individu dalam menghadapi tekanan keuangan, yang dalam literatur dikenal sebagai *financial resilience*. Pada pengguna *paylater*, kemampuan menghadapi tekanan keuangan menjadi semakin penting karena kewajiban pembayaran cicilan bersifat tetap dan harus dipenuhi meskipun terjadi penurunan pendapatan atau muncul pengeluaran yang tidak direncanakan. Ketika individu tidak memiliki cadangan dana yang memadai, gangguan finansial yang relatif kecil

dapat berkembang menjadi masalah keuangan yang lebih serius (Wiersma et al., 2025). OECD (2022) mendeskripsikan *financial resilience* sebagai kapasitas untuk menghadapi guncangan keuangan yang tiba-tiba, menjaga taraf hidup yang layak selama masa krisis, serta bangkit kembali secara mandiri tanpa ketergantungan pada bantuan pihak lain dalam jangka panjang. Garcia-Santillan (2026) memperluas definisi ini dengan menekankan bahwa *financial resilience* tidak hanya melibatkan kemampuan bertahan dalam krisis yang telah terjadi, tetapi juga mencakup persiapan proaktif melalui perencanaan keuangan yang baik, diversifikasi pendapatan, serta manajemen utang yang cerdas dan terencana.

Data kondisi *financial resilience* masyarakat Indonesia menunjukkan situasi yang masih sangat rapuh. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (2025) sekitar 98,9% rekening bank di Indonesia memiliki saldo di bawah Rp100 juta, yang menunjukkan sedikitnya cadangan finansial yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Hanya 19% warga Indonesia yang memiliki dana darurat yang cukup untuk mempertahankan kebutuhan hidup selama tiga hingga enam bulan tanpa penghasilan (Indopremier, 2025), sementara 19,9% dari populasi tidak memiliki tabungan dalam bentuk apa pun (BPS, 2025).

Tabel 1. 5 *Financial Resilience* Masyarakat Indonesia Tahun 2025

Indikator	Persentase
Rekening dengan saldo < Rp100 juta	98,9%
Memiliki dana darurat	19%
Tidak memiliki tabungan	19,9%

Tabel 1. 6 *Financial Resilience* Masyarakat Indonesia Tahun 2025 (Lanjutan)

Indikator	Presentase
Menabung secara rutin	89%
Pengguna BNPL yang mengambil pinjaman baru untuk membayar cicilan lama	±12%

Sumber: LPS (2025); OECD Financial Resilience Framework; Indopremier (2025)

Tabel 1.5 menggambarkan ketidakseimbangan yang serius antara beban kewajiban finansial akibat penggunaan kredit digital dan minimnya cadangan keuangan masyarakat. Pengguna *paylater* yang tidak memiliki dana darurat namun tetap harus memenuhi kewajiban cicilan berada dalam kondisi yang sangat rentan, satu gangguan keuangan saja, seperti kehilangan pekerjaan, sakit mendadak, atau pengeluaran tak terduga lainnya, dapat mengganggu kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. OJK (2024) mencatat bahwa sekitar 12% pengguna BNPL terpaksa meminjam uang dari sumber lain untuk membayar cicilan yang jatuh tempo, yang menunjukkan hilangnya *financial resilience* dan secara langsung merusak *financial well-being* dalam jangka panjang.

Kaitannya dengan hal tersebut, penelitian oleh Garcia-Santillan et al. (2026) menunjukkan bahwa *financial resilience* memberikan dampak positif dan signifikan terhadap *financial well-being*, serta berfungsi sebagai respons yang tepat dalam menghadapi berbagai krisis keuangan. Mereka yang memiliki *financial resilience* tinggi tidak hanya lebih mampu melalui masa krisis, tetapi juga biasanya pulih lebih cepat dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Curry (2025) menambahkan bahwa *financial resilience* berperan sebagai penghubung antara literasi keuangan dan kesejahteraan emosional individu, artinya individu dengan

financial resilience yang baik lebih mampu menjaga kualitas hidup meskipun menghadapi tekanan ekonomi yang besar.

Tingkat *financial resilience* seseorang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah elemen yang berkaitan dengan keterampilan mengatur keuangan. Salah satu elemen yang sangat krusial adalah *financial capability*. Guo dan Huang (2023) menggambarkan *financial capability* sebagai kapasitas menyeluruh individu untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat dalam berbagai keadaan, termasuk kemampuan untuk mengakses produk keuangan yang relevan dan memanfaatkannya secara maksimal guna memperbaiki kesejahteraan jangka panjang. Aziz et al. (2023) menegaskan bahwa *financial capability* merupakan interaksi aktif antara pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan yang terbentuk melalui pengalaman hidup nyata individu, bukan hanya sebagai pemahaman teoretis belaka. Oleh karena itu, program peningkatan *financial capability* harus dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk mengubah sikap dan menciptakan kebiasaan perilaku keuangan yang positif dan berkelanjutan.

Kondisi *financial capability* masyarakat Indonesia, khususnya di antara pengguna layanan *paylater*, masih memprihatinkan dan perlu perhatian serius. Indeks literasi keuangan nasional yang dirilis oleh OJK (2024) hanya mencapai 65,43%, yang menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga populasi produktif di Indonesia masih kekurangan pengetahuan dan keterampilan finansial yang memadai untuk membuat keputusan keuangan yang benar. OECD (2025) dalam survei global yang melibatkan 39 negara menemukan bahwa lebih dari separuh

pengguna kredit online tidak sepenuhnya menyadari risiko yang timbul akibat keterlambatan pembayaran, termasuk konsekuensi berupa denda finansial, bunga majemuk, serta dampak negatif terhadap skor kredit mereka. Ketidapkahaman ini tidak hanya mencerminkan kelemahan pengetahuan, tetapi juga kelemahan sistemik dalam ekosistem pendidikan keuangan yang ada.

Tabel 1. 7 Kondisi *Financial Capability* Masyarakat Indonesia

Indikator	Nilai / Persentase
Indeks literasi keuangan Indonesia	65,43%
Pengguna kredit online yang tidak memahami risiko keterlambatan	>50%
Pengguna <i>paylater</i> yang tidak membuat rencana keuangan sebelum bertransaksi	±55%
Gap antara inklusi keuangan dan literasi keuangan	9,59%

Sumber: OJK (2024); OECD (2025); Rahmadhani & Nasution (2025)

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan sebesar 9,59% mencerminkan kondisi di mana banyak masyarakat telah menggunakan produk keuangan digital, termasuk *paylater*, tanpa memiliki bekal kemampuan finansial yang memadai. Keterkaitan yang erat antara *financial capability* dan *financial resilience* telah dibuktikan melalui sejumlah penelitian penting. Secara konseptual, individu yang memiliki *financial capability* yang baik cenderung lebih mampu menyusun anggaran, mengelola arus kas, membentuk dana darurat, serta mengantisipasi berbagai risiko keuangan. Kemampuan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun *financial resilience* karena ketahanan keuangan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif. Garcia-Santillan (2026) menunjukkan bahwa *financial capability* memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial resilience*, sementara Kempson et al. (2022) menegaskan bahwa *financial capability* adalah elemen dasar yang tidak dapat digantikan untuk membangun *financial resilience* yang kuat tanpa pengetahuan, keterampilan, dan sikap keuangan yang memadai, seseorang tidak akan dapat merencanakan dan menyimpan dana yang diperlukan untuk menghadapi guncangan ekonomi yang tidak terduga.

Dalam konteks pengguna *paylater* di Karesidenan Madiun, hubungan antara *financial capability* dan *financial resilience* berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Survei tentang perilaku keuangan digital menunjukkan bahwa sekitar 55% pengguna *paylater* tidak membuat rencana keuangan sebelum bertransaksi dan tidak mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum memutuskan untuk mengambil cicilan baru. Kebiasaan transaksi tanpa perencanaan ini mencerminkan rendahnya *financial capability*. Penelitian oleh Putri dan Mangifera (2024) menemukan bahwa orang dengan *financial capability* rendah cenderung menggunakan *paylater* secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, sehingga mengakibatkan mereka cepat kehabisan dana cadangan, lebih rentan terhadap guncangan finansial, dan menghadapi kesulitan dalam membangun *financial resilience* yang diperlukan. Dengan demikian, rendahnya *financial capability* tidak hanya memengaruhi kondisi *financial well-being* secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung mengurangi *financial resilience* yang seharusnya menjadi bantalan ketika situasi keuangan memburuk.

Penelitian oleh Rahmadhani dan Nasution (2025) menunjukkan secara empiris bahwa *financial capability* memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial*

well-being melalui proses mediasi yang mencakup penurunan kecemasan finansial dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Individu yang memiliki *financial capability* tinggi terbukti menunjukkan pola pengelolaan keuangan yang lebih teratur dan disiplin, jarang mengalami kecemasan finansial, dan akhirnya mampu mencapai *financial well-being* yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Guo dan Huang (2023) serta Aziz et al. (2023) yang juga menemukan hubungan positif dan signifikan antara *financial capability* dan *financial well-being* di berbagai konteks budaya dan ekonomi yang berbeda. Rahayu et al. (2026) menambahkan bahwa *financial capability* merupakan mediator kuat dalam hubungan antara literasi keuangan dan *financial well-being* di kalangan generasi muda Indonesia, melebihi pengaruh literasi digital, otonomi finansial, serta kecenderungan impulsif.

Di sisi lain, penelitian mengenai hubungan antara *financial capability* dan *financial well-being* masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Nourallah et al. (2025) menemukan bahwa *financial capability* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial well-being* maupun *financial stress*, berbeda dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh positif. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh *financial capability* terhadap *financial well-being* kemungkinan tidak selalu terjadi secara langsung, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain yang dapat memperkuat atau memediasi hubungan tersebut. Salah satu faktor yang secara teoritis berpotensi berperan adalah *financial resilience*, karena kemampuan mengelola keuangan yang baik dapat membantu individu membangun ketahanan finansial sebelum akhirnya mencapai kondisi

financial well-being. Namun demikian, Garcia-Santillan et al. (2026) menemukan bahwa *financial resilience* tidak mampu memediasi hubungan antara *financial capability* dan *financial well-being* secara signifikan.

Temuan yang ada mengindikasikan bahwa *financial capability* tidak hanya berdampak langsung pada *financial well-being*, tetapi juga bisa memperkuat *financial resilience* individu. Kemampuan yang baik dalam mengatur keuangan memungkinkan seseorang untuk menciptakan dana cadangan, mengelola risiko, dan menjaga kestabilan keuangan ketika mengalami tekanan ekonomi. *Financial resilience* yang terbentuk berkontribusi pada peningkatan *financial well-being*. Dengan demikian, diduga bahwa *financial resilience* berfungsi sebagai perantara dalam hubungan antara *financial capability* dan *financial well-being*.

Selain *financial capability*, kemampuan mengendalikan diri atau *self-control* juga menjadi faktor krusial yang membentuk perilaku keuangan individu. *Self-control* dalam konteks keuangan pribadi adalah kemampuan dasar untuk menahan dorongan konsumtif dan menggantinya dengan keputusan yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, serta sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang yang telah ditetapkan (Strömbäck et al., 2021). Kemampuan *self-control* menjadi semakin penting di era rangsangan konsumtif yang hadir secara terus-menerus melalui berbagai platform digital yang menyelimuti kehidupan sehari-hari. Platform *e-commerce* yang terhubung dengan layanan BNPL secara cermat dirancang untuk memanfaatkan berbagai kecenderungan psikologis konsumen, termasuk *present bias* atau kecenderungan untuk lebih memilih kesenangan saat ini daripada manfaat di masa mendatang, *loss aversion* atau ketakutan akan kehilangan

penawaran terbatas, dan *social proof* atau kecenderungan untuk meniru perilaku belanja orang lain. Bai (2023) secara empiris membuktikan bahwa paparan berulang terhadap berbagai tawaran promosi menarik mengurangi kemampuan *self-control* konsumen seiring waktu, sehingga membuat individu semakin rentan terhadap pembelian impulsif yang dapat merugikan kestabilan keuangan jangka panjang.

Data empiris menunjukkan bahwa kondisi *self-control* masyarakat Indonesia dalam penggunaan *paylater* masih sangat memprihatinkan. Laporan Deloitte (2024) mengungkapkan bahwa sekitar 60% pengguna memanfaatkan layanan *paylater* bukan untuk kebutuhan yang harus dipenuhi segera, melainkan untuk memenuhi keinginan konsumtif yang bersifat sekunder hingga tersier. Sekitar 52% konsumen digital Indonesia mengaku berbelanja secara impulsif di platform online, sementara sekitar 45% tidak memiliki anggaran bulanan yang jelas dan terstruktur. Ketiadaan anggaran yang terstruktur membuat individu tidak memiliki pedoman untuk menilai apakah suatu pengeluaran itu wajar, sehingga semakin rentan terhadap pengaruh rangsangan konsumtif dari luar.

Tabel 1. 8 Pola Konsumsi Digital Masyarakat Indonesia

Indikator	Persentase
Belanja impulsif secara daring	±52%
Menggunakan <i>paylater</i> untuk kebutuhan non-prioritas	±60%
Tidak memiliki anggaran bulanan	±45%

Sumber: Deloitte (2024)

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa rendahnya pengendalian diri masih menjadi salah satu tantangan utama dalam perilaku keuangan masyarakat Indonesia.

Beberapa peneliti telah membuktikan hubungan antara *self-control* dan *financial resilience* secara empiris. Menurut Sabri et al. (2024) individu yang memiliki *self-control* yang baik cenderung mampu menunda kepuasan sesaat demi tujuan keuangan jangka panjang, menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan, serta mempertahankan disiplin dalam menabung dan mengelola pengeluaran karakteristik yang berkontribusi terhadap terbentuknya cadangan keuangan yang dapat digunakan ketika menghadapi tekanan ekonomi. Baumeister et al. (2024) menekankan bahwa *self-control* adalah kemampuan psikologis esensial yang memengaruhi langsung kemampuan individu untuk mempertahankan kestabilan keuangannya seiring waktu. Hernandez-Perez dan Cruz Rambaud (2025) menemukan bahwa rendahnya *self-control* secara langsung berdampak negatif pada kondisi keuangan individu melalui peningkatan frekuensi kesulitan finansial, yang perlahan-lahan mengurangi *financial resilience* dan akhirnya merusak *financial well-being* secara keseluruhan.

Berbagai penelitian juga menunjukkan secara konsisten adanya kaitan yang kuat antara *self-control* dan *financial well-being*. Strömbäck et al. (2021) menemukan bahwa *self-control* memberikan dampak positif pada *financial well-being* melalui dua cara, yaitu meningkatkan rasa aman dalam keuangan dan mengurangi rasa cemas terkait masalah finansial. Bai (2023) menunjukkan bahwa *self-control* memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap *financial well-being* berkat kemampuannya dalam mengatur pengeluaran serta memperbesar simpanan, sementara du Plessis et al. (2024) mengungkapkan bahwa *self-control* dalam pengeluaran konsumen memiliki dampak positif yang signifikan pada

financial well-being dan berfungsi sebagai mediator kuat antara kepuasan kebutuhan dasar psikologis dan *financial well-being*.

Ketidakkonsistenan dalam penelitian ini tetap ada, Ramadhini (2023) mencatat bahwa *self-control* tidak memberikan pengaruh signifikan langsung terhadap *financial well-being*, sedangkan Younas et al. (2021) menemukan bahwa dampak dari *self-control* terhadap *financial well-being* bersifat tidak langsung, melalui perantara perilaku keuangan yang lebih baik. Ketidakkonsistenan ini mengisyaratkan bahwa pengaruh *self-control* terhadap *financial well-being* kemungkinan dimediasi oleh variabel lain yang relevan, termasuk *financial resilience*. Berdasarkan Tabel 1.3 kesenjangan struktural antara pendapatan dan biaya hidup masyarakat di Karesidenan Madiun mencerminkan kapasitas finansial yang terbatas di tengah tekanan konsumsi digital yang tinggi akibat penggunaan *paylater*. Kondisi ini menjadikan pengujian peran mediasi *financial resilience* dalam hubungan antara *self-control* dan *financial well-being* penting dan relevan untuk dilakukan, guna menghasilkan bukti empiris yang sesuai dengan konteks lokal.

Financial capability dan *self-control* bukan satu-satunya variabel yang membentuk perilaku keuangan individu dalam ekosistem kredit digital, terdapat variabel lain yang turut berperan, yaitu *financial risk tolerance*. Wang dan McGroarty (2022) mendefinisikan *financial risk tolerance* sebagai tingkat kenyamanan psikologis yang dimiliki seseorang saat menghadapi kemungkinan kerugian finansial akibat keputusan keuangan yang telah dibuat. Konsep ini berbeda secara substansial dari sekadar persepsi risiko yang lebih menekankan aspek

kognitif, karena *financial risk tolerance* mencerminkan sikap emosional yang lebih mendalam terhadap risiko secara umum. Aroyo dan kolega (2026) memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa *financial risk tolerance* adalah ambang batas maksimum risiko finansial yang dapat diterima seseorang dalam berbagai situasi, yang dipengaruhi secara bersamaan oleh faktor demografis seperti usia dan tingkat pendapatan, faktor psikologis seperti kepribadian dan orientasi temporal, serta pengalaman keuangan pribadi di masa lalu.

Dalam penggunaan layanan *paylater*, setiap kredit yang dilakukan membawa risiko yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, mencakup bunga yang menumpuk, denda keterlambatan yang signifikan, kemungkinan gagal bayar yang berdampak pada reputasi kredit, serta konsekuensi buruk bagi skor kredit yang dapat memengaruhi akses ke layanan keuangan di masa mendatang. Bunyamin dan Wahab (2022) menyatakan bahwa individu yang memiliki toleransi risiko yang wajar dan dilengkapi dengan kemampuan analisis manfaat serta risiko yang menyeluruh cenderung memanfaatkan layanan kredit digital secara lebih bijaksana, sementara mereka yang mengambil risiko tanpa pertimbangan matang justru memperburuk kondisi keuangan mereka. Wang dan McGroarty (2022) menegaskan bahwa toleransi risiko yang tinggi hanya dapat memberikan hasil yang positif apabila disertai kemampuan manajemen risiko yang baik, tanpa kemampuan tersebut, toleransi risiko yang berlebihan justru dapat berkorelasi negatif dengan *financial well-being* dalam jangka panjang.

Tabel 1. 9 Profil Perilaku Risiko Keuangan Pengguna Kredit Digital Indonesia

Indikator	Persentase
Pengguna <i>paylater</i> yang tidak membaca syarat dan ketentuan sebelum bertransaksi	±67%
Pengguna yang tidak mempertimbangkan risiko gagal bayar saat mengambil cicilan	±58%
Pengguna yang mengambil lebih dari satu pinjaman BNPL secara bersamaan	±34%
Pengguna yang merasa nyaman berutang untuk konsumsi non-esensial	±41%
Pengguna yang pernah mengalami gagal bayar setidaknya sekali	±18%

Sumber: OJK (2024); OECD (2025); Deloitte (2024)

Tabel 1.8 mengungkap pola perilaku risiko keuangan yang menjadi perhatian serius dalam konteks penggunaan *paylater* di Indonesia. Lebih dari dua pertiga pengguna tidak membaca syarat dan ketentuan sebelum bertransaksi, sementara lebih dari separuh tidak mempertimbangkan risiko gagal bayar sebelum mengambil cicilan baru. Kondisi ini semakin dipertegas oleh fakta bahwa sekitar 41% pengguna merasa nyaman berutang untuk konsumsi non-esensial dan 34% mengambil lebih dari satu pinjaman BNPL secara bersamaan, mencerminkan *financial risk tolerance* yang tidak diimbangi dengan kemampuan manajemen risiko yang memadai. Kondisi ini dipertegas oleh fakta bahwa sekitar 18% pengguna telah mengalami gagal bayar setidaknya sekali, yang secara langsung menandakan erosi *financial resilience* mereka.

Mathew et al. (2024) berpendapat bahwa individu yang menoleransi risiko keuangan secara berlebihan dengan mengambil pinjaman berganda tanpa perencanaan yang matang akan menguras cadangan likuiditas yang seharusnya

menjadi penyangga ketahanan finansial. Hal ini sejalan dengan Lusardi et al. (2024) yang menyatakan bahwa *financial resilience* tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan aset, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam mengelola eksposur risiko secara bertanggung jawab, sehingga ketika tekanan finansial datang, individu tetap mampu mempertahankan stabilitas keuangannya. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan individu semakin rentan terhadap guncangan ekonomi yang tidak terduga, sehingga kemampuan *financial resilience* dalam menjaga stabilitas keuangan menjadi semakin terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, Hemrajani et al. (2023) membuktikan secara empiris bahwa *financial risk tolerance* berpengaruh signifikan positif terhadap *financial resilience*, di mana individu yang mampu mengelola toleransi risikonya secara proporsional terbukti memiliki ketahanan finansial yang lebih kuat. Hasil ini diperkuat oleh Pangestu & Santoso (2024) yang menemukan bahwa persepsi risiko keuangan yang terkelola dengan baik pada pengguna layanan *paylater* secara signifikan berkontribusi pada peningkatan stabilitas dan ketahanan finansial mereka. Dengan demikian, pengelolaan *financial risk tolerance* yang tepat menjadi faktor krusial dalam membangun *financial resilience* yang kokoh, khususnya di tengah maraknya penggunaan kredit digital di Indonesia.

Secara konseptual, pola perilaku pengguna *paylater* yang teridentifikasi dalam Tabel 1.8 menggambarkan bagaimana *financial risk tolerance* dapat bekerja secara kontraproduktif terhadap *financial well-being*. Kemudahan akses kredit yang ditawarkan *paylater* mendorong pengguna untuk mengambil risiko keuangan bukan demi investasi atau penciptaan nilai, melainkan semata-mata untuk memenuhi

konsumsi jangka pendek yang melampaui kapasitas finansial mereka. Arpana dan Swapna (2021) menemukan bahwa *risk tolerance* berpengaruh positif terhadap *financial well-being* ketika individu menggunakannya untuk berinvestasi dan membangun aset keuangan secara aktif. Wang dan McGroarty (2022) turut memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa toleransi risiko yang lebih tinggi berkontribusi pada akumulasi kekayaan yang pada gilirannya meningkatkan *financial well-being*. Sementara itu, Guo dan Huang (2023) mencatat bahwa penggunaan produk keuangan berisiko secara tidak tepat seperti yang tercermin pada perilaku pengguna *paylater* yang mengambil pinjaman berganda untuk konsumsi non-esensial justru berpengaruh negatif terhadap *financial well-being*, mengisyaratkan bahwa toleransi risiko hanya berdampak positif apabila diiringi dengan keputusan keuangan yang bijak dan terencana.

Ketidakkonsistenan dalam penelitian mengenai hubungan *financial risk tolerance* dan *financial well-being* juga masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan. Arpana dan Swapna (2021) menemukan hubungan positif yang kuat di antara keduanya, sedangkan Aroyo et al. (2026) tidak menemukan pengaruh yang signifikan, dan Mathew et al. (2024) bahkan menemukan pengaruh negatif karena individu dengan toleransi risiko tinggi cenderung mengabaikan proteksi finansial jangka panjang yang menjadi fondasi ketahanan finansial. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh *financial risk tolerance* terhadap *financial well-being* kemungkinan besar tidak bersifat langsung dan linier, melainkan dimediasi oleh variabel lain yang relevan. Dalam perspektif ketahanan keuangan, *financial risk tolerance* yang berada pada tingkat yang tepat memungkinkan individu untuk

mengambil keputusan keuangan secara lebih rasional ketika menghadapi ketidakpastian, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari berbagai guncangan ekonomi. Dalam konteks pengguna *paylater* di Karesidenan Madiun di mana perilaku risiko keuangan terbentuk dalam ekosistem yang secara aktif mendorong konsumsi melebihi kemampuan finansial, pengujian peran mediasi *financial resilience* dalam hubungan ini menjadi sangat penting untuk menghasilkan pemahaman empiris yang lebih utuh.

Berdasarkan uraian di atas, ketiga variabel tersebut *financial capability*, *self-control*, dan *financial risk tolerance* secara teoritis tidak hanya memengaruhi *financial well-being* secara langsung, tetapi juga berpotensi membentuk *financial resilience* sebagai mekanisme penting dalam menjaga kesejahteraan keuangan individu. Hitesh Kumar dan Sandhu (2024) menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai *financial capability* yang baik, *self-control* yang kokoh, serta *financial risk tolerance* yang cukup cenderung lebih mampu membentuk simpanan keuangan, menyesuaikan diri dengan tekanan ekonomi, dan menjaga stabilitas finansial ketika dihadapkan pada situasi yang tidak terduga. Kondisi ini mencerminkan tingginya *financial resilience* dan pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan *financial well-being*. Namun demikian, hasil riset sebelumnya masih memperlihatkan beragam temuan, Garcia-Santillan et al. (2026) menemukan bahwa *financial resilience* berpengaruh positif terhadap *financial well-being*, tetapi efektivitasnya sebagai variabel mediasi masih menunjukkan hasil yang belum konsisten di berbagai konteks penelitian. Perbedaan temuan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai peran *financial resilience* sebagai

variabel mediasi, terutama untuk pengguna *paylater* di usia produktif yang menghadapi risiko keuangan digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan telaah literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa *research gap* yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, masih ditemukan inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh *financial capability*, *self-control*, dan *financial risk tolerance* terhadap *financial well-being*, dengan mediasi *financial resilience*, beberapa penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan bahkan berpengaruh negatif. Kedua, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada mahasiswa, masyarakat perkotaan, atau pengguna layanan keuangan secara umum, sehingga masih terbatas penelitian yang secara khusus meneliti pengguna *paylater* usia produktif. Ketiga, penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika *financial well-being* pada pengguna *paylater* di Karesidenan Madiun masih sangat terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian *financial resilience* sebagai variabel mediasi yang menghubungkan *financial capability*, *self-control*, dan *financial risk tolerance* terhadap *financial well-being* dalam satu model struktural, yang diuji secara khusus pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun. Berbeda dari mayoritas penelitian terdahulu yang menguji hubungan langsung antarvariabel pada konteks mahasiswa atau masyarakat perkotaan besar, penelitian ini memperluas pengujian empiris pada wilayah semi-urban dengan karakteristik ekonomi yang berbeda, sekaligus berkontribusi pada

pengembangan model perilaku keuangan yang lebih komprehensif dalam literatur manajemen keuangan perilaku.

Berdasarkan fenomena empiris, kesenjangan penelitian, serta urgensi permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan dengan judul **"Pengaruh *Financial Capability*, *Self-Control*, dan *Financial Risk Tolerance* terhadap *Financial Well-Being* dengan Mediasi *Financial Resilience* pada Pengguna *Paylater* Usia Produktif di Karesidenan Madiun"**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur manajemen keuangan perilaku, khususnya terkait *financial well-being* pengguna kredit digital, sekaligus menjadi masukan bagi masyarakat, penyedia layanan *paylater*, dan regulator dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dapat dianalisis secara lebih fokus dan mendalam, serta untuk mencegah meluasnya pembahasan yang dapat mengurangi ketajaman analisis, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat usia produktif (20–40 tahun) yang berdomisili di wilayah Karesidenan Madiun, meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan yang telah memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan.
2. Responden dalam penelitian ini adalah individu yang telah menggunakan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), seperti Shopee *PayLater*, Kredivo,

Akulaku, dan layanan serupa lainnya, dengan pengalaman penggunaan minimal tiga bulan.

3. Penelitian ini hanya membahas variabel *financial capability*, *self-control*, dan *financial risk tolerance* sebagai variabel independen; *financial well-being* sebagai variabel dependen; serta *financial resilience* sebagai variabel mediasi.
4. Penelitian ini menitikberatkan pada kondisi *financial well-being* individu pengguna BNPL, tanpa memfokuskan pada aspek lembaga atau penyedia layanan BNPL serta faktor eksternal lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial capability* berpengaruh terhadap *financial resilience* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun?
2. Apakah *self-control* berpengaruh terhadap *financial resilience* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun?
3. Apakah *financial risk tolerance* berpengaruh terhadap *financial resilience* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun?
4. Apakah *financial capability* berpengaruh terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun?
5. Apakah *self-control* berpengaruh terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun?

6. Apakah *financial risk tolerance* berpengaruh terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun?
7. Apakah *financial resilience* berpengaruh terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun?
8. Apakah *financial resilience* mampu memediasi pengaruh *financial capability* terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun?
9. Apakah *financial resilience* mampu memediasi pengaruh *self-control* terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun?
10. Apakah *financial resilience* mampu memediasi pengaruh *financial risk tolerance* terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah. Dengan demikian, tujuan penelitian ini secara spesifik adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial capability* terhadap *financial resilience* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun.
2. Untuk mengetahui pengaruh *self-control* terhadap *financial resilience* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financial risk tolerance* terhadap *financial resilience* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun.

4. Untuk mengetahui pengaruh *financial capability* terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun.
5. Untuk mengetahui pengaruh *self-control* terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun.
6. Untuk mengetahui pengaruh *financial risk tolerance* terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun.
7. Untuk mengetahui pengaruh *financial resilience* terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun.
8. Untuk mengetahui peran *financial resilience* dalam memediasi pengaruh *financial capability* terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun.
9. Untuk mengetahui peran *financial resilience* dalam memediasi pengaruh *self-control* terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun.
10. Untuk mengetahui peran *financial resilience* dalam memediasi pengaruh *financial risk tolerance* terhadap *financial well-being* pada pengguna *paylater* usia produktif di Karesidenan Madiun.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang berarti baik dari segi teori maupun praktik dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan, terutama dalam memahami *financial well-being* individu yang berada dalam fase produktif, khususnya dalam konteks penggunaan layanan keuangan digital seperti *Buy Now Pay Later* (BNPL). Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur di bidang manajemen keuangan, khususnya mengenai konsep *financial well-being* pada individu usia produktif yang menggunakan layanan BNPL. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel penting, yaitu *financial capability*, *self-control*, *financial risk tolerance*, dan *financial resilience*, dengan tujuan berkontribusi pada pengembangan model perilaku keuangan yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga diharapkan memperkuat dasar teori yang berkaitan dengan perilaku keuangan, seperti Teori Perilaku Terencana, Teori Pengaturan Diri, dan teori ketahanan finansial. Temuan penelitian dapat menjadi acuan dan fondasi bagi penelitian-penelitian mendatang yang membahas *financial well-being* masyarakat dalam konteks digitalisasi layanan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

a. Untuk Masyarakat Usia Produktif

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya *financial capability*, *self-control*, *financial risk tolerance*, dan *financial resilience* dalam menunjang *financial well-being*, sehingga pengguna *paylater* dapat lebih bijaksana dalam memanfaatkan layanan kredit digital.

b. Untuk Regulator dan Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait perlindungan konsumen layanan keuangan digital, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan program *financial resilience* bagi masyarakat usia produktif.

c. Untuk Penyedia Layanan BNPL

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyedia layanan *paylater* dalam merancang produk dan fitur yang mendukung *financial well-being* pengguna, bukan sekadar mendorong konsumsi.

d. Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pijakan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai *financial well-being* dalam konteks layanan keuangan digital, khususnya di wilayah-wilayah dengan karakteristik ekonomi lokal yang spesifik.